



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
**SUB UNIT KERJA** : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADI SOEPRIJANTO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 545529

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.339.000.000

1. Bangunan Seluas 56 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI  
Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/55 m2 di MALANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 609.000.000
3. Tanah Seluas 193 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp.  
500.000.000
4. Tanah Seluas 161 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp.  
500.000.000
5. Tanah Seluas 19969 m2 di SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp.  
130.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 285.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XEON GX125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER ULTIMATE Tahun 2018, HASIL  
SENDIRI Rp. 267.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.615.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	4.239.000.000
III. HUTANG	Rp.	362.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.876.500.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.